**SISTEM PENGOLAHAN DATA PEGAWAI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
MENGUNAKAN “DELPHI 7”**

DEVI DAMAYANTI

165100019, 785567853

Fakultas Komputer

devidamayanti.student@umira.ac.id

Abstract

Kebutuhan manusia akan informasi memacu pesatnya perkembangan teknologi di bidang informasi dan telekomunikasi. Kemajuan teknologi yang semakin meningkat didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, membuktikan bahwa kini informasi telah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Sistem informasi dan teknologi informasi dalam hal ini berfungsi sebagai pendukung untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia.

Pengelolaan informasi dengan komputer umumnya memiliki jumlah yang besar dari segi data yang dikelola, dan juga memerlukan perangkat-perangkat pendukung dengan biaya pengelolaan dan perawatan yang besar, akan tetapi informasi yang dihasilkan lebih akurat, cepat dan efisien. Dalam melakukan tugasnya, bagian kepegawaian di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan melakukan proses pengolahan data dengan menggunakan *Microsoft Word* dan pencatatan secara manual ke dalam buku besar.

Informasi mengenai kepegawaian merupakan hal yang utama, sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mengelola data-data pegawai dengan baik sehingga memudahkan dalam menyediakan informasi tentang data-data pegawai secara cepat dan tepat.

Di sini kebutuhan akan informasi secara akurat dan tepat sangat dibutuhkan, maka dari itu dirancanglah suatu aplikasi yang dapat menangani semua masalah kepegawaian. Dikarenakan banyaknya kelemahan yang disebabkan pengolahan data secara manual, maka pada tugas laporan PKN ini akan berorientasi pada pembuatan aplikasi perangkat lunak untuk menangani masalah pengolahan data pegawai dan pembuatan laporan kepegawaian agar lebih terorganisir.

Kata Kunci: pengolahan data pegawai dinas perhubungan kabupaten menggunakan delphi.

A. INTRODUCTION

Materi Ke 1 membahas mengenai i cloud system ...dst
tambahkan gambar untuk memperkuat penjelasan (Gunakan Minimal 400 kata)

Jawab:

SISTEM PENGOLAHAN DATA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MENGUNAKAN DELPHI 7.0

Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten.

Secara Umum Dinas Perhubungan Kabupaten merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dalam tugas pembantuan .

2.1.1 Profil Instansi

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan terletak di Jl. Wonorejo KM.17 Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo, yang diresmikan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2003 oleh Bapak Bupati Pasuruan yang pada waktu itu di jabat oleh Drs. Dade Angga.

2.1.2 Visi Dinas Perhubungan

“Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Transportasi yang *SMART* (Selamat, Murah, Andal, *Responsibility* dan Tertib)”

Adapun terminologi dari rumusan visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pelayanan Transportasi mempunyai arti terwujudnya pelayanan transportasi yang mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan daerah

Selamat mempunyai arti terjaminnya keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa transportasi dari awal sampai tujuan perjalanan yang diinginkan.

Murah mempunyai arti terjangkau biaya perjalanan yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dapat terjangkau dengan daya beli secara efektif dan efisien.

Andal mempunyai arti terwujudnya pelayanan transportasi yang pasti, nyaman, tepat waktu, dan menjangkau sampai keseluruhan wilayah Kabupaten Pasuruan.

Responsibility mempunyai arti terwujudnya masyarakat yang memiliki budaya bertanggungjawab dan kesadaran tertib berlalu lintas di jalan.

Tertib mempunyai arti terwujudnya pelayanan transportasi yang terencana, tertata dan teratur.

2.1.3 Misi Dinas Perhubungan

"Mewujudkan layanan transportasi yang *SMART* (*Safety*, Murah, Andal,*Responsibility*, Tertib)"

2.1.4 Tujuan Dinas Perhubungan

1. Mengembangkan kelembagaan dan kewenangan sesuai dengan potensi dan sumber daya manusia.
2. Mewujudkan pelayanan transportasi yang efisien dan efektif.
3. Memberdayakan seluruh potensi transportasi yang tersedia dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
4. Mewujudkan transportasi sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

2.1.5 Sasaran Dinas Perhubungan

1. Terwujudnya sistem transportasi yang terintegrasi antar moda.
2. Terwujudnya penyelenggaraan transportasi darat, laut dan udara.
3. Terwujudnya peningkatan pelayanan publik di bidang transportasi.
4. Terciptanya iklim persaingan usaha jasa transportasi secara sehat.

2.1.6 Strategi Dinas Perhubungan

1. Pembuatan database transportasi.
2. Penyusunan sistem dan prosedur penyelenggaraan transportasi.
3. Peningkatan pendidikan dan pelatihan pengemudi dan pejalan kaki.
4. Peningkatan pembinaan pengawasan kepada pengemudi dan pejalan kaki.
5. Peningkatan pelayanan jasa transportasi.
6. Peningkatan sistem evaluasi kegiatan dinas.

2.1.7 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

Sesuai dengan peraturan Bupati No 42 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

A. Kedudukan Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan

- a. Kedudukan Dinas Perhubungan
 1. Dinas perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati
 2. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

- b. Tugas Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dalam tugas pembantuan.

- c. Fungsi Dinas Perhubungan
 1. Pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan
 2. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dibidang perhubungan
 3. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan
 4. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga dinas
 5. Pelaksanaan tugas_tugas lain yang di berikan oleh Bupati.

B. Organisasi Dinas Perhubungan

- a. Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari
 1. Kepala Dinas

2. Sekretariat
3. Bidang Pengembangan Moda
4. Bidang Teknik
5. Bidang Lalu lintas
6. Bidang Angkutan
7. Unit Pelaksana Teknik Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Sekretariat, Bidang, Unit pelaksana teknis Dinas, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

2.1.8 Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor

A. Kedudukan Tugas Dan Fungsi UPTD

a. Kedudukan UPTD

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perhubungan
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD) dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala unit yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

b. Tugas UPTD

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Pengujian Kendaraan Bermotor Mempunyai Tugas Melaksanakan Sebagian Tugas Dinas Perhubungan terhadap pengujian kendaraan bermotor

c. Fungsi UPTD

1. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data kendaraan wajib uji.

2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor.

3. Pelaksanaan pengelolaan pemeriksaan pengujian berkala kendaraan bermotor..

4. Pelaksanaan pengelolaan Keuangan retribusi atau upah uji kendaraan bermotor.

5. Pelaksanaan penilaian pemeriksaan teknis kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan, lelang atau di jadikan hak kepemilikan.

6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

B. Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor

1. Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Pengujian Kendaraan Bermotor.

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

b. Kasubag Tata Usaha

2. Di dalam pelaksanaan tugasnya kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Pengujian Kendaraan Bermotor di bantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

C. Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor

1. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Pengujian Kendaraan Bermotor wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Pengujian Kendaraan Bermotor dalam

melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Pengujian Kendaraan Bermotor wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pelaksana yang beradadalam lingkungannya

D. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Pengujian Kendaraan Bermotor di bantu oleh pelaksana yaitu penguji kendaraan bermotor yang telah memenuhi syarat dan memiliki sertifikat kompetensi teknis pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan jejang jabatannya.

2. Jenjang jabatan pengujian kendaraan bermotor terdiri dari:

- Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Semula
- Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana
- Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan
- Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia

3. Dalam melaksanakan tugasnya penguji kendaraan bermotor memastikan kelayakan jalan kendaraan bermotor yang meliputi pengujian berkala, pengujian tipe, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor.

4. Penguji kendaraan bermotor diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.1.9 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

B. CONTENT

Anda Boleh memilih **Studi Kasus, Studi Referensi** ataupun **Studi Penalaran** (Baca: Hal yang akan anda paparkan pada bagian content ini) ; ex:Materi Ke 1 membahas mengenai i cloud system ...dst tambahkan gambar untuk memperkuat penjelasan (Gunakan Minimal 600 kata) & Reference dibawah Tidak Boleh Dirubah

Jawab :

Contoh Studi Kasus :

Dinas Perhubungan Kabupaten merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dalam tugas pembantuan .

2.1.1 Profil Instansi

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan terletak di Jl. Wonorejo KM.17 Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo, yang diresmikan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2003 oleh Bapak Bupati Pasuruan yang pada waktu itu di jabat oleh Drs. Dade Angga.

2.1.2 Visi Dinas Perhubungan

“Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Transportasi yang *SMART* (Selamat, Murah, Andal, *Responsibility* dan Tertib)”

Adapun terminologi dari rumusan visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pelayanan Transportasi mempunyai arti terwujudnya

pelayanan transportasi yang mampu memadukan moda transportasi lainnya

C. CONCLUSION

Kesimpulan dari materi ini adalah(minimal 150 kata)

Jawab:

Kesimpulan yang diperoleh dari Praktek Kerja Nyata dan mengetahui hasilnya sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam mengerjakan pembuatan software.
2. Dengan Adanya Sistem Pengolahan Data Pegawai ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam input data pegawai.
3. Aplikasi Pengolahan Data Pegawai ini diharapkan dapat mempercepat pemrosesan data.
4. Sistem Pengolahan Data Pegawai ini dapat *mengentri* data pegawai, jabatan dan golongan sampai pelaporan.
5. Sistem pengerjaannya tidak dilakukan secara manual.

D. DISCUSSION

Hasil diskusi dari materi ini adalah(minimal 150 kata)

Jawab:

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sistem terbentuk dari bagian atau elemen yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Kebutuhan informasi saat ini sangat meningkat, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi yang dibutuhkan tidak dilihat dari jumlah informasi yang dihasilkan, tetapi kualitas dari informasi tersebut

Ada beberapa definisi system yang dikemukakan oleh para ahli, sebagai berikut:

M. Sobry Sutikno (2004): *System* adalah totalitas struktur yang terdiri dari unsur-unsur, dimana masing-masing unsur tersebut mempunyai fungsi khusus, dan diantara mereka saling berinteraksi dan interaksi dalam upaya pencapaian tujuan bersama.

Soenarwan (1991): *System* adalah satu totalitas struktur yang tersiri dari komponen-komponen didalam mana tiap-tiap komponen itu mempunyai fungsi khusus, dan diantara mereka terdapat saling berhubungan, interaksi dan interpedensi yang secara bersama-sama menuju kepada tujuan bersama.

Edgar F. Huse & Jame L. Bowditch (1993): *System* adalah suatu seri (rangkai) bagian-bagian yang saling berhubungan dan bergantung sedemikian rupa sehingga interaksi

dan saling pengaruh dari satu bagian akan mempengaruhi keseluruhan.

C.W. Churchman (1968): *System* adalah sebagian perangkat bagian-bagian yang dikoordinasi untuk melaksanakan seperangkat tujuan.

John McManama (1971): *System* adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang bekerja sama satu kesatuan *organic* untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien.

E. REFERENCE

- [1] O. M. Febriani and A. S. Putra, "Sistem Informasi Monitoring Inventori Barang Pada Balai Riset Standardisasi Industri Bandar Lampung," *J. Inform.*, vol. 13, no. 1, pp. 90–98, 2014.
- [2] A. S. Putra, "Paperplain: Execution Fundamental Create Application With Borland Delphi 7.0 University Of Mitra Indonesia," 2018.
- [3] A. S. Putra, "2018 Artikel Struktur Data, Audit Dan Jaringan Komputer," 2018.
- [4] A. S. Putra, "ALIAS MANAGER USED IN DATABASE DESKTOP STUDI CASE DB DEMOS."
- [5] A. S. Putra, "COMPREHENSIVE SET OF PROFESSIONAL FOR DISTRIBUTE COMPUTING."
- [6] A. S. Putra, "DATA ORIENTED RECOGNITION IN BORLAND DELPHI 7.0."
- [7] A. S. Putra, "EMBARCADERO DELPHI XE 2 IN GPU-POWERED FIREMONKEY APPLICATION."
- [8] A. S. Putra, "HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM DUNIA TEKNOLOGY BERBASIS REVOLUSI INDUSTRI 4.0."
- [9] A. S. Putra, "IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANGAN UU. NO 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI BERBASIS INFORMATION TECHNOLOGY."
- [10] A. S. Putra, "IMPLEMENTATION OF PARADOX DBASE."
- [11] A. S. Putra, "IMPLEMENTATION OF TRADE SECRET CASE STUDY SAMSUNG MOBILE PHONE."
- [12] A. S. Putra, "IMPLEMENTATION PATENT FOR APPLICATION WEB BASED CASE STUDI WWW. PUBLIKLAMPUNG.COM."
- [13] A. S. Putra, "IMPLEMENTATION SYSTEM FIRST TO INVENT IN DIGITALLY INDUSTRY."
- [14] A. S. Putra, "MANUAL REPORT & INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT BORLAND DELPHI 7.0."
- [15] A. S. Putra, "PATENT AS RELEVAN SUPPORT RESEARCH."
- [16] A. S. Putra, "PATENT FOR RESEARCH STUDY CASE OF APPLE. Inc."
- [17] A. S. Putra, "PATENT PROTECTION FOR APPLICATION INVENT."
- [18] A. S. Putra, "QUICK REPORT IN PROPERTY PROGRAMMING."
- [19] A. S. Putra, "REVIEW CIRCUIT LAYOUT COMPONENT REQUIREMENT ON ASUS NOTEBOOK."
- [20] A. S. Putra, "REVIEW TRADEMARK PATENT FOR INDUSTRIAL TECHNOLOGY BASED 4.0."
- [21] A. S. Putra, "TOOLBAR COMPONENT PALLETTE IN

- OBJECT ORIENTED PROGRAMMING.”
- [22] A. S. Putra, “WORKING DIRECTORY SET FOR PARADOX 7.”
- [23] A. S. Putra, “ZQUERY CONNECTION IMPLEMENTED PROGRAMMING STUDI CASE PT. BANK BCA Tbk.”
- [24] A. S. Putra, D. R. Aryanti, and I. Hartati, “Metode SAW (Simple Additive Weighting) sebagai Sistem Pendukung Keputusan Guru Berprestasi (Studi Kasus: SMK Global Surya),” in *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 2018, vol. 1, no. 1, pp. 85–97.
- [25] A. S. Putra and O. M. Febriani, “Knowledge Management Online Application in PDAM Lampung Province,” in *Prosiding International conference on Information Technology and Business (ICITB)*, 2018, pp. 181–187.
- [26] A. S. Putra, O. M. Febriani, and B. Bachry, “Implementasi Genetic Fuzzy System Untuk Mengidentifikasi Hasil Curian Kendaraan Bermotor Di Polda Lampung,” *SIMADA (Jurnal Sist. Inf. dan Manaj. Basis Data)*, vol. 1, no. 1, pp. 21–30, 2018.
- [27] A. S. Putra, H. Sukri, and K. Zuhri, “Sistem Monitoring Realtime Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Dengan Konsep Jaringan Sensor Nirkabel,” *IJEIS (Indonesian J. Electron. Instrum. Syst.)*, vol. 8, no. 2, pp. 221–232.
- [28] D. P. Sari, O. M. Febriani, and A. S. Putra, “Perancangan Sistem Informasi SDM Berprestasi pada SD Global Surya,” in *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 2018, vol. 1, no. 1, pp. 289–294.